

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan Rahmat dan KaruniaNya telah mengijinkan kami tim penyusun untuk menyelesaikan kegiatan penyusunan **Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDN dan SMPN Kabupaten Tangerang**. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, yang terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, pelaksanaan, dan kelengkapan lainnya.

Menyadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami tim penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Demikianlah Laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai **Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDN dan SMPN Kabupaten**.

Kabupaten Tangerang, 2019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | I-3 |
| 1.3 Keluaran | I-3 |
| 1.4 Lokasi Kegiatan | I-4 |
| 1.5 Dasar Hukum | I-5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | II-1 |
| 2.1 Konsep Mutu Pendidikan..... | II-1 |
| 2.2 Standar atau Parameter Pendidikan yang Berkualitas | II-6 |
| 2.3 Dimensi Mutu Pendidikan | II-8 |
| 2.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan | II-13 |
| 2.5 Hubungan Sarpras Pendidikan dengan Proses Belajar Mengajar | II-13 |
| 2.6 Prinsip-prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan | II-14 |
| 2.7 Kerangka Pemikiran | II-15 |

| | |
|--|--------------|
| BAB III METODOLOGI | III-1 |
| 3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian..... | III-1 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data..... | III-1 |
| 3.3 Metode Analisis Data..... | III-6 |
| 3.4 Bidang Perikanan | III-11 |
| 3.5 Program dan Capaian..... | III-12 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |
| 4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | III-1 |
| 3.2 Jadwal Tenaga Ahli..... | III-2 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|--------|
| Tabel 3.1 Sebaran Sampel Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Sebaran Populasi..... | III-2 |
| Tabel 3.2 Sebaran Sampel Sekolah Menengah Pertama Negeri Berdasarkan Sebaran Populasi | III-4 |
| Tabel 3.3 Rasio Luas Lahan Terhadap Peserta Didik SD..... | III-9 |
| Tabel 3.4 Rasio Minimum Lahan Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik | III-9 |
| Tabel 3.5 Rasio Luas Lahan Terhadap Peserta Didik SMP..... | III-10 |
| Tabel 3.6 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik | III-10 |
| Tabel 4.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | IV-1 |
| Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Untuk Tenaga Ahli..... | IV-3 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-------|
| Gambar 2.1 Hubungan Antar Variabel | II-16 |
| Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan..... | III-4 |
| Gambar 3.2 Diagram Luas Tanam Di Kota Tangerang Selatan | III-5 |

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dalam tanggung jawab pembangunan berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga diberikan kepada satuan pendidikan, baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, dan masyarakat atau *stakeholders* pendidikan. Hal ini relevan dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based development participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) (Direktorat Jendera Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002).

Pendidikan merupakan pondasi dasar dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berujung pada pembangunan bangsa. Sehebat apapun rencana dan program kerja pemerintah kalau tidak didukung oleh faktor SDM yang mumpuni maka akan hanya menjadi sebuah rumah tanpa penopang. Esensi yang mendasar pada pembangunan daerah adalah dimulai dengan SDM yang handal dan kompeten dan siap mengikuti perkembangan jaman secara perkembangan teknologi.

Tentunya pembangunan SDM ini tidak bisa lepas dari sekolah. Sebuah lembaga yang memproses anak bangsa dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berkualitas menjadi berkualitas. Sehingga, awal mula pemerintah dalam membangun SDM adalah pembenahan sekolah sebagai rumah pembangunan SDM.

Salah satu keberhasilan sekolah/pendidikan adalah didukung oleh manajemen sekolah yang bagus dan tenaga pendidik dan kependidikan yang mumpuni. Di Kabupaten Tangerang masih terdapat tenaga pendidikan yang belum linear, antara latar belakang pendidikan dengan pelajaran yang diampu (data hasil penelitian Manajemen Berbasis Sekolah tahun 2016). Masih banyaknya tenaga kependidikan sebagai administrasi sekolah yang belum memahami teknologi (operasional komputer, Internet) sehingga beberapa sekolah yang harusnya menerapkan Kurikulum 2013 terkendala yang disebabkan oleh operator sekolah (Kependidikan). Permasalahan-permasalahan ini sangatlah urgent dalam dunia pendidikan. Pentingnya adanya konsep dalam memecahkan permasalahan diatas agar Indek Pendidikan di Kabupaten Tangerang bisa lebih baik dalam tenaga pendidikan dan kependidikan.

Salah satu masalah mendasar dalam bidang pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001). Mutu pendidikan di Indonesia selama ini masih belum mengalami peningkatan yang signifikan dan merata. Sebagian sekolah, terutama di kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2001) terdapat sedikitnya tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu:

1. Pendekatan *education production function* atau *input & ouput analysis* yang digunakan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dilaksanakan secara konsekuen.
2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratiksentralistik.
3. Peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Saat ini Kabupaten Tangerang terus mengupayakan dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah

Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam rangka hal tersebut maka dilakukan Kajian Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN adalah Menemukan konsep atau model dalam memecahkan permasalahan pendidikan di SDN dan SMPN kabupaten Tangerang khususnya pada tenaga pendidik dan Kependidikan. Sedangkan tujuan dari kegiatan Kajian Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah:

1. Tersedianya jumlah murid, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahliannya pada setiap sekolah.
2. Tersedianya data penyebaran sekolah, pendidik, kependidikan beserta muridnya.
3. Tersedianya data sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas kelengkapan lainnya.
4. Menggali permasalahan mengenai tenaga pendidik dan kependidikan di SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang
5. Menciptakan model atau pola sebagai pemecahan masalah tenaga pendidik dan kependidikan di SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang
6. Menciptakan sistem atau pola pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar nasional.

1.3. Keluaran

Keluaran kegiatan Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN adalah Tersedianya dokumen dalam pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di SDN dan SMPN kabupaten Tangerang.

1.4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN, berlokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang.

1.5. Dasar Hukum

Pelaksanaan “Diseminasi Penelitian”, berpijak pada dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
9. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Mutu Pendidikan

Beberapa ahli mendefinisikan mutu pendidikan berdasarkan ketercapaian tujuan sebagai mana dikemukakan oleh (Suryadi, 1994), mutu pendidikan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai tujuan kurikulum (*objective of curriculum*) yang dirancang untuk pengelolaan pembelajaran siswa. Selanjutnya, Suryadi dan Tilaar (1994) menegaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendaya gunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Pendapat ini, memandang bahwa mutu pendidikan dapat di capai dengan menggunakan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik atau alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain menyebutkan mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari ketercapaian tujuan, namun juga penting dinilai dari manfaat *output* sistem pendidikan yang dirasakan oleh pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Sebagaimana dikemukakan Satori (2006), mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas *input*, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Hoy *et. al.* (2000) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Senada dengan (Danim, 2008), kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Sejalan dengan pendapat di atas, Coombs (1985) melihat konsep mutu pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi belajar, seperti yang dikaitkan dengan kurikulum dan standarnya saja tetapi mutu harus dilihat dari segi relevansi dan sejauh mana apa yang diajarkan dan dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan belajar saat ini dan untuk masa yang akan datang. Lebih jauh dikemukakan bahwa masalah mutu pendidikan hendaknya dikaitkan dengan keseluruhan dimensi mutu secara sistemik yang berubah dari masa ke masa.

Dalam perspektif yang lebih luas, mutu pendidikan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sosiologi, sebagaimana pandangan Beeby (1966) melihat mutu pendidikan dari tiga perspektif yaitu: perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja didalam berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan dan pembebasan kebodohan. Sedangkan menurut perspektif pendidikan, melihat mutu pendidikan perspektif pendidikan dari sisi pengayaan (*richness*) dari proses belajar mengajar dan dari segikemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berpikir kritis. (Suderadjat, 2005).

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*). Lebih lanjut, Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia

seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) yaitu mereka yang mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal.

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Menurut Suryadi (2001) seperti dikutip oleh Wirataputra (2003) mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan membangun kemampuan siswa untuk belajar (*building capacity of students to learn*). Dalam konteks pendidikan; pengertian mutu menurut Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah (2001), mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.

Input pendidikan adalah sebagai sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Sesuatu yang dimaksud adalah sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. *Input* sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa). *Input* perangkat lunak meliputi: struktur organisasi di sekolah, rencana kegiatan/deskripsi kegiatan, program dan sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi dan misi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001).

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedang sesuatu dan hasil proses disebut *output*. Dalam skala pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengelolaan kelembagaan, proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, proses belajar-mengajar, dan proses belajar-mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan proses-proses lainnya.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya dan moral kerjanya (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2001).

Berkaitan dengan proses atau upaya untuk mencapai mutu pendidikan, yang menghasilkan *output* berdaya guna dalam masyarakat, ada beberapa pandangan yang dikemukakan para ahli; antara lain Umaedi (1999) dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan, yang bermutu terlibat berbagai *input*, seperti: bahan ajar (kognitif, efektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai *input* tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (hasil ulangan atau ujian), dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni, bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.

Kemampuan pengelolaan sekolah oleh manajemen sekolah juga menentukan pencapaian kualitas *output*. Menurut Achmad (1990) mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Engkoswara (2010) melihat mutu/keberhasilan pendidikan dari tiga sisi, yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah. Slamet (1999) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang melihat banyaknya tamatan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau yang diterima di dunia usaha.

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan yaitu:

1. Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Kesesuaian dan ketercapaian standar perlu dievaluasi secara berkala, dan hasil temuan ditindaklanjuti untuk memperbaiki arah pelaksanaan jika pelaksanaan melenceng dari standar, mempertahankan atau meningkatkan standar jika standar yang ditetapkan telah tercapai. Jadi peningkatan mutu pendidikan perlu ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan oleh institusi penyelenggara pendidikan itu sendiri (*internally driven*).

Mempertahankan ketercapaian dan peningkatan standar perlu dilaksanakan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Sallis (2002) mengidentifikasi dan mengelompokkan konsumen atau pelanggan pendidikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal meliputi para pendidik dan staf pendukung. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi pelanggan eksternal utama adalah peserta didik; pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua, pemerintah dan *employers*; serta pelanggan eksternal tersier adalah pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat. Sallis menyarankan agar pendidikan dipandang sebagai industri jasa, dan usaha memenuhi kebutuhan peserta didik harus menjadi fokus utama dalam mengelola mutu. Sekalipun demikian menurutnya tidak berarti harus mengabaikan pandangan-pandangan dari kelompok pelanggan lainnya.

2.2. Standar atau Parameter Pendidikan yang Berkualitas

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, ada delapan (8) standar yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu: Pasal 1 ayat 5 sampai 12.

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

5. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan didapatkan bahwa:

1. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan tata cara pemenuhan standar.
2. Standar satuan pendidikan terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
3. Standar biaya pribadi Peserta Didik terdiri atas:perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.

2.3. Dimensi Mutu Pendidikan

Menurut UNESCO dalam buku *EFA Global Monitoring Report 2005* atau Laporan Pemantauan Global Pendidikan untuk semua ada lima dimensi yang terkait dengan mutu pendidikan, yaitu:

1. Karakteristik pembelajar (*learner characteristics*)

Dimensi ini sering disebut sebagai masukan (*inputs*) atau malah masukan kasar (*raw inputs*) dalam teori fungsi produksi (*production function theory*), yaitu peserta didik atau pembelajar dengan berbagai latar belakangnya, seperti pengetahuan (*aptitude*), kemauan dan semangat untuk belajar (*perseverance*), kesiapan untuk bersekolah (*school readiness*), pengetahuan siap sebelum masuk sekolah (*prior knowledge*) dan hambatan untuk pembelajaran (*barriers to learning*) terutama bagi anak luar biasa. Banyak faktor latar belakang peserta didik yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan di negeri ini. Banyak anak usia sekolah yang tidak didukung oleh kondisi yang kondusif, misalnya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga bermasalah (*broken home*), kesehatan lingkungan, pola asuh anak usia dini dan faktor-faktor lain-lainnya. Dimensi ini menjadi faktor awal yang mempengaruhi mutu pendidikan.

2. Pengupayaan masukan (*enabling inputs*)

Ada dua macam masukan yang akan mempengaruhi mutu pendidikan yang dihasilkan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fiskal. Guru atau pendidik, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lain menjadi sumber daya manusia (*human resources*) yang akan mempengaruhi mutu hasil belajar siswa (*outcomes*). Proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan nyaman dan aman jika fasilitas belajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, buku dan bahan ajar lainnya (*learning materials*), media dan alat peraga yang dapat diupayakan oleh sekolah, termasuk perpustakaan dan laboratorium, bahkan juga kantin sekolah, dan fasilitas pendidikan lainnya, seperti buku

pelajaran dan kurikulum yang digunakan di sekolah. Semua itu dikenal sebagai infrastruktur fisik (*physical infrastructure* atau *facilities*). Singkat kata, mutu SDM yang tersedia di sekolah dan mutu fasilitas sekolah merupakan dua macam masukan yang sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan.

3. Proses belajar-mengajar (*teaching and learning*)

Dimensi ketiga ini sering disebut sebagai kotak hitam (*black box*) masalah pendidikan. Dalam kotak hitam ini terdapat tiga komponen utama pendidikan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, yaitu peserta didik, pendidik, dan kurikulum. Tanpa peserta didik, siapa yang akan diajar? Tanpa pendidik, siapa yang akan mengajar, dan tanpa kurikulum, bahan apa yang akan diajarkan? Oleh karena itu mutu proses belajar mengajar, atau mutu interaksi edukatif yang terjadi di ruang kelas, menjadi faktor yang amat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Efektivitas proses belajar-mengajar dipengaruhi oleh: (1) lama waktu belajar, (2) metode mengajar yang digunakan, (3) penilaian, umpan balik, bentuk penghargaan bagi peserta didik dan (4) jumlah peserta didik dalam satu kelas.

Ruang kelas di Indonesia sangat kering dengan media dan alat peraga. Pakar pendidikan, Dr. Arif Rahman, M.Pd. sering menyebutkan bahwa ruang kelas kita ibarat menjadi penjara bagi anak-anak. Jika diumumkan ada rapat dewan pendidik, dalam arti tidak ada kelas, maka bersoraklah para siswa, ibarat keluar dari pintu penjara tersebut. Sesungguhnya, di sinilah kelemahan terbesar pendidikan di negeri ini. Proses belajar mengajar di ruang kelas kita sangat kering dari penggunaan teknik penguatan (*reinforcement*), kering dari penggunaan media dan alat peraga yang menyenangkan. Dampaknya, dapat diterka, yaitu hasil belajar yang belum memenuhi standar mutu yang ditentukan. Sentral permasalahan lemahnya proses belajar mengajar di dalam kelas ini, sebenarnya sudah diketahui, yakni kualifikasi dan kompetensi guru. Setengah guru kita

belum memenuhi standar kualifikasi. Apalagi dengan standar kompetensinya. Timbullah istilah ‘guru tak layak’. Belum lagi dengan masalah kesejahteraannya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa semua masalah bersumber dari masalah kesejahteraan. Memang, kesejahteraan guru menjadi salah satu syarat agar guru dapat disebut sebagai profesi, selain (1) memerlukan keahlian, (2) keahlian itu diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan, (3) keahlian itu diperlukan masyarakat, (4) punya organisasi profesi, (5) keahlian yang dimiliki dibayar dengan gaji yang memadai (Suparlan, 2006).

4. Hasil belajar (*outcomes*)

Hasil belajar adalah sasaran yang diharapkan oleh semua pihak. Di sini memang terjadi perbedaan harapan dari pihak-pihak tersebut. Pihak dunia usaha dan industri (DUDI) mengharapkan lulusan yang siap pakai. Pendidikan kejuruan dipacu agar dapat memenuhi harapan ini. Sedang pihak praktisi pendidikan pada umumnya cukup berharap lulusan yang siap latih. Alasannya agar DUDI dapat memberikan peran lebih besar lagi dalam memberikan pelatihan.

Setidaknya, semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menghasilkan lulusan yang dapat membaca dan menulis (*literacy*), berhitung (*numeracy*) dan kecakapan hidup (*life skills*). Ini memang pasti. Selain itu, peserta didik harus memiliki kecerdasan emosional dan sosial (*emotional* dan *sosial intelligences*), nilai-nilai lain yang diperlukan masyarakat. Terkait dengan berbagai macam kecerdasan, Howard Gardner menegaskan bahwa “satu-satunya sumbangan paling penting untuk perkembangan anak adalah membantunya untuk menemukan bidang yang paling cocok dengan bakatnya” (Goleman, 2005). Hasil belajar yang akan dicapai sesungguhnya yang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta sesuai dengan tipe kecerdasannya, di samping juga nilai-nilai kehidupan (*values*) yang diperlukan untuk memelihara dan menstransformasikan budaya dan kepribadian bangsa.

5. Konteks (*contexts*) atau lingkungan (*environments*)

Keempat dimensi yang telah dijelaskan tersebut saling pengaruh-mempengaruhi dengan konteks (*contexts*) atau lingkungan (*environments*) yang meliputi berbagai aspek alam, sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Townsend-Butterworth (1992) di dalam bukunya *Your First Child's School*, ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas, yaitu:

1. Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah;
2. Partisipasi & rasa tanggung jawab guru & staf;
3. Proses belajar mengajar yang efektif;
4. Pengembangan staf yang terprogram;
5. Kurikulum yang relevan;
6. Mempunyai visi serta misi yang terang;
7. Iklim sekolah yang kondusif;
8. Penilaian diri pada kapabilitas serta kelemahan;
9. Komunikasi efektif baik internal ataupun eksternal; dan
10. Keterlibatan orang lanjut usia serta warga dengan cara intrinsik.

Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu ke waktu, sehingga antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik dimana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar mengajar, lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antarpersonil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para siswa untuk berinteraksi secara baik, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan siswa dengan karyawan, serta secara umum interaksi antarpersonil. Dan kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung

secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif dalam hal ini, misalnya adanya keakraban yang proporsional antara guru, siswa dan orangtua serta masyarakat sekitar dalam proses pembelajaran.

Lingkungan merupakan sumber belajar yang tidak dapat diabaikan. Beberapa faktor yang datang dari masyarakat dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi:

1. Media massa; di luar jam sekolah atau disekolah terkadang siswa membaca buku selain buku pelajaran, seperti koran, atau menonton televisi, sehingga lupa akan tugas belajar. Maka bacaan dan tontonan siswa perlu diawasi dan diseleksi.
2. Teman bergaul; setiap manusia selalu berusaha untuk mengembangkan sosialisasinya, anak perlu bergaul dengan anak lain, dan perlu diawasi agar anak bergaul dengan teman yang baik agar dapat memberikan pengaruh baik pula.
3. Cara hidup lingkungan sekitar akan memberikan pengaruh besar pada sikap dan kebiasaan siswa, termasuk kebiasaan belajar. Siswa yang hidup dalam lingkungan yang selalu belajar keras, sikap itu akan mempengaruhi perilakunya.

Di sisi lain Heyneman dan Loxley (1983) menyimpulkan bahwa kualitas sekolah dan guru nampaknya sangat berpengaruh pada prestasi akademis di seluruh dunia dan semakin miskin suatu negara, semakin kuat pengaruh tersebut. Sejalan dengan yang disampaikan Husaini Usman (2009) bahwa ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau *input-input* analisis yang tidak konsisten;
2. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; dan
3. Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.

2.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 PP 19 tahun 2005 (yang tidak berubah dalam PP no. 32 th 2013) dengan tegas disebutkan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2.5. Hubungan Sarpras Pendidikan Dengan Proses Belajar Mengajar

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. *Pertama*, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai contoh papan tulis, atlas, buku dan media dan sumber pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. *Kedua*, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor yang secara tidak langsung digunakan guru dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. *Pertama*, prasarana pendidikan yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. *Kedua*, prasarana sekolah

yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar secara langsung. Contohnya adalah ruang kantor, kantin sekolah, ruang UKS, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

2.6. Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut : (Imron, 2003)

- a. *Prinsip pencapaian tujuan*, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar;
- b. *Prinsip efisiensi*, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Dan pemakaiannya pun dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan;
- c. *Prinsip administratif*, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang;
- d. *Prinsip kejelasan tanggung jawab*, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah; dan
- e. *Prinsip kekohesifan*, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses yang sangat kompak.

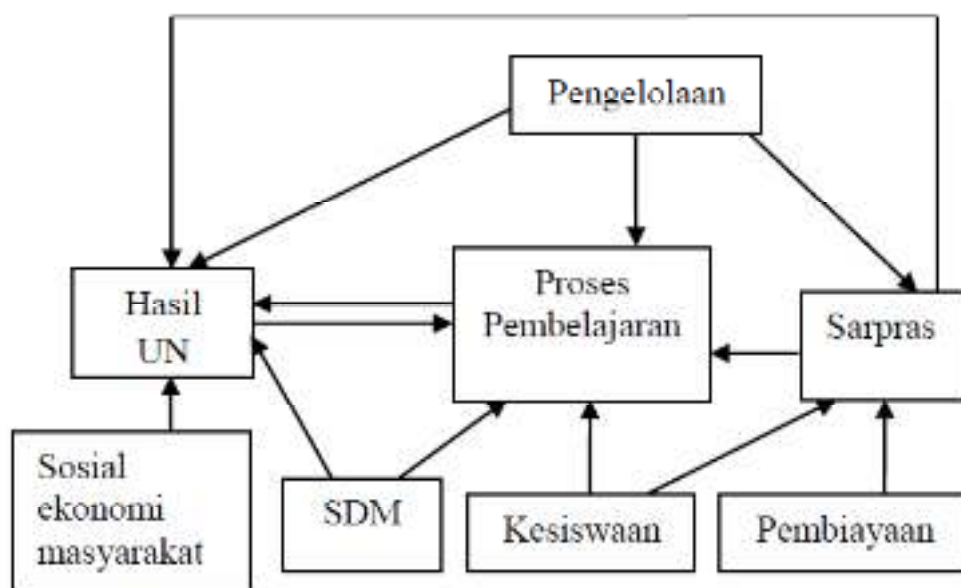
2.7. Kerangka Pemikiran

Proses pembelajaran dan hasil dari proses belajar tentu perlu ditunjang oleh layanan manajemen yang teratur. Sejalan dengan Tawnsend-Butterworth (1992) yang mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen sekolah termasuk pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif, pengembangan SDM yang terprogram, komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dan keterlibatan warga dan orang tua, akan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Di samping itu proses pembelajaran yang baik juga memerlukan *input* yang berkualitas pula di antaranya sarana prasarana dan sumber daya manusia atau guru. Umaedi (1999) mengatakan *input* dari proses pendidikan adalah sarana prasarana seperti sumber belajar, fasilitas belajar, dan juga guru atau sumber daya manusia dengan berbagai metodogi yang digunakan.

Guru dalam proses dan hasil belajar memegang peranan penting dan sentral. Dewasa ini, sebagian guru juga mempunyai tugas tambahan sebagai pengelola baik pada bidang kurikulum, sarpras, kesiswaan dan juga top manajemen sekolah. Imron dkk. (2003) menegaskan bahwa guru merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan, tidak mungkin ada peningkatan mutu pendidikan tanpa peningkatan performansi gurunya dan ini mutlak dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa guru merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun bukan berarti keberadaan unsur unsur lain tidak penting. Peningkatan performa guru memerlukan adanya layanan yang profesional di bidang sarana dan prasarana dalam menerapkan kemampuannya secara maksimal. Hamalik (1994) menegaskan “sudah jelas bahwa di samping dibutuhkannya guru-guru yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih memadai, juga diperlukan cara-cara bekerja dan sikap yang baru, peralatan yang lengkap, dan sistem administrasi yang lebih teratur.

Variabel kesiswaan lebih menekankan pada kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk pengembangan karakter siswa, kegiatan ini juga memerlukan perhatian dan keterlibatan guru secara terintegrasi, yang pada akhirnya mempengaruhi proses dan hasil belajar. Baiknya kegiatan kesiswaan juga terkait dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Lingkungan sosial ekonomi masyarakat secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kondisi lingkungan sekolah dan keluarga menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. "Di sekolah nilai-nilai kehidupan ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi pengaruh dan pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang siswa (Tu'u, 2004). Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa keterlibatan orangtua siswa dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah dapat memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan proses dan hasil belajar. Uraian ini dapat dikemukakan dalam bentuk diagram di bawah ini. Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antarvariabel dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel

BAB III

METODOLOGI

3.1. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Wilayah Kajian Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan SDN Dan SMPN Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan waktu pelaksanaan kajian mulai dari bulan September hingga November 2019.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil meliputi data sekunder, yaitu data yang telah dihimpun oleh instansi lain yang berkaitan dengan kajian ini. Adapun data sekunder meliputi data-data terkait sarana prasarana, jumlah murid, jumlah guru, serta jumlah guru tersertifikasi yang tersedia di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Jenis data kedua adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari responden yang narasumber kunci (*key Informant*). Narasumber kunci ini adalah mereka yang mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru SD dan SMP. Adapun jumlah narasumber kunci yang diambil adalah sebanyak 5 orang.

Dalam menganalisis data sekunder yang ada maka dilakukan pengambilan sampel dari data sekunder yang ada. Adapun populasi data sekunder tersebut adalah jumlah Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Tangerang berjumlah 757 unit sekolah, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 74 unit sekolah. Adapun pengambilan sampel dari setiap tingkatan sekolah berdasarkan rumus Slovin dalam pengambilan sampel dengan tingkat kesalahan sebesar 5% didapatkan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = Pupulasi

e = tingkat kesalahan

Adapun jumlah sampel untuk Sekolah Dasar Negeri dengan populasi sebanyak 757 unit sekolah adalah sebesar:

$$n = \frac{757}{1 + (757 \times 5\%^2)}$$

$$n = 262$$

Dengan pembagian populasi setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sebaran Sampel Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Sebaran Populasi

| KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SDN (UNIT) | JUMLAH SAMPEL (UNIT) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Cisoka | 28 | 10 |
| Solear | 21 | 7 |
| Tigaraksa | 38 | 13 |
| Jambe | 16 | 6 |
| Cikupa | 41 | 14 |

| KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SDN (UNIT) | JUMLAH SAMPEL (UNIT) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Panongan | 26 | 9 |
| Curug | 32 | 11 |
| Kelapa Dua | 23 | 8 |
| Legok | 28 | 10 |
| Pagedangan | 29 | 10 |
| Cisauk | 17 | 6 |
| Pasar Kemis | 26 | 9 |
| Sindang Jaya | 24 | 8 |
| Balaraja | 30 | 10 |
| Jayanti | 18 | 6 |
| Sukamulya | 20 | 7 |
| Kresek | 26 | 9 |
| Gunung Kaler | 22 | 8 |
| Kronjo | 30 | 10 |
| Mekar Baru | 21 | 7 |
| Mauk | 29 | 10 |
| Kemiri | 15 | 5 |
| Sukadiri | 18 | 6 |
| Rajeg | 40 | 14 |
| Sepatan | 17 | 6 |
| Sepatan Timur | 19 | 7 |
| Pakuhaji | 35 | 12 |

| KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SDN (UNIT) | JUMLAH SAMPEL (UNIT) |
|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Teluknaga | 39 | 13 |
| Kosambi | 29 | 10 |
| Jumlah/Total | 757 | 262 |

Sedangkan untuk jumlah sampel Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan populasi 74 unit sekolah adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{74}{1 + (74 \times 5\%^2)}$$

$$n = 62$$

Dengan pembagian sampel berdasarkan sebaran populasi setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sebaran Sampel Sekolah Menengah Pertama Negeri Berdasarkan Sebaran Populasi

| KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SDN (UNIT) | JUMLAH SAMPEL (UNIT) |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| Cisoka | 2 | 2 |
| Solear | 7 | 6 |
| Tigaraksa | 4 | 3 |
| Jambe | 1 | 1 |
| Cikupa | 4 | 3 |
| Panongan | 2 | 2 |
| Curug | 1 | 1 |
| Kelapa Dua | 2 | 2 |

| KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH SDN (UNIT) | JUMLAH SAMPEL (UNIT) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Legok | 2 | 2 |
| Pagedangan | 3 | 3 |
| Cisauk | 2 | 2 |
| Pasar Kemis | 5 | 4 |
| Sindang Jaya | 1 | 1 |
| Balaraja | 3 | 3 |
| Jayanti | 2 | 2 |
| Sukamulya | 2 | 2 |
| Kresek | 2 | 2 |
| Gunung Kaler | 2 | 2 |
| Kronjo | 1 | 1 |
| Mekar Baru | 4 | 3 |
| Mauk | 3 | 3 |
| Kemiri | 4 | 3 |
| Sukadiri | 1 | 1 |
| Rajeg | 3 | 3 |
| Sepatan | 2 | 2 |
| Sepatan Timur | 2 | 2 |
| Pakuhaji | 2 | 2 |
| Teluknaga | 3 | 3 |
| Kosambi | 2 | 2 |
| Jumlah/Total | 74 | 62 |

Dengan pengambilan sampel tersebut maka nantinya dapat dianalisis kualitas mutu pendidikan dari penilaian sarana prasarana, jumlah guru, jumlah murid, dan kualitas guru yang ada.

3.3. Metode Analisis Data

Adapun analisis setiap tujuan kajian yang sesuai dengan peraturan perundangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan peraturan perundangan lainnya:

1. Tersedianya jumlah murid, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keahliannya pada setiap sekolah.

Metode analisis yang digunakan untuk tujuan pertama dengan melakukan pendataan dengan analisis diskriptif kuantitatif. Adapun standar yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

- Satu SDN memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar dan satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
- Perbandingan guru SD dengan murid sebesar 1: 20, dan perbandingan guru SMP dengan murid sebesar 1:20.
- Kualifikasi Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, dan kualifikasi Guru pada SMP/MTs,

atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/ madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut: a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun. b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut: a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun. b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. a. Penjaga Sekolah/Madrasah Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. b. Tukang Kebun Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m² . c. Tenaga Kebersihan Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. d. Pengemudi Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat. e. Pesuruh Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
2. Tersedianya data penyebaran sekolah, pendidik, kependidikan beserta muridnya.

Metode analisis yang digunakan untuk tujuan kedua dengan melakukan pendataan dengan analisis diskriptif kuantitatif. Adapun standar yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

- Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru, dan satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
 - Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI, dan Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
 - Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan, dan Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
3. Tersedianya data sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas kelengkapan lainnya.

A. Standar Sarana dan Prasarana SD

Tabel 3.3 Rasio Luas Lahan Terhadap Peserta Didik SD

| NO | BANYAK ROMBONGAN BELAJAR | RASIO MINIMUM LUAS LANTAI BANGUNAN TERHADAP PESERTA DIDIK (M ² /PESERTA DIDIK) | | |
|----|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | | BANGUNAN SATU LANTAI | BANGUN DUA LANTAI | BANGUNAN TIGA LANTAI |
| 1 | 6 | 12,7 | 7,0 | 4,9 |
| 2 | 7-12 | 11,1 | 6,0 | 4,3 |
| 3 | 13-18 | 10,6 | 5,6 | 4,1 |
| 4 | 19-24 | 10,3 | 5,5 | 4,1 |

Tabel 3.4 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik

| NO | BANYAK ROMBONGAN BELAJAR | RASIO MINIMUM LUAS LANTAI BANGUNAN TERHADAP PESERTA DIDIK (M ² /PESERTA DIDIK) | | |
|----|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | BANGUNAN SATU LANTAI | BANGUN DUA LANTAI | BANGUNAN TIGA LANTAI |
| 1 | 6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 2 | 7-12 | 3,3 | 3,6 | 3,8 |
| 3 | 13-18 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| 4 | 19-24 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar yang tertulis di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

B. Standar Sarana dan Prasarana SMP

Tabel 3.5. Rasio Luas Lahan Terhadap Peserta Didik SMP

| No | Banyak rombongan belajar | Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m^2 /peserta didik) | | |
|----|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 22,9 | - | - |
| 2 | 4-6 | 16 | 8,5 | - |
| 3 | 7-9 | 13,8 | 7,5 | 5,1 |
| 4 | 10-12 | 12,8 | 6,8 | 4,7 |
| 5 | 13-15 | 12,2 | 6,6 | 4,5 |
| 6 | 16-18 | 11,9 | 6,3 | 4,3 |
| 7 | 19-21 | 11,6 | 6,2 | 4,3 |
| 8 | 22-24 | 11,4 | 6,1 | 4,3 |

Tabel 3.6. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik

| No | Banyak rombongan belajar | Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m^2 /peserta didik) | | |
|----|--------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | Bangunan satu lantai | Bangunan dua lantai | Bangunan tiga lantai |
| 1 | 3 | 6,9 | - | - |
| 2 | 4-6 | 4,8 | 5,1 | - |
| 3 | 7-9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 |
| 4 | 10-12 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| 5 | 13-15 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| 6 | 16-18 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 19-21 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| 8 | 22-24 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar yang tertulis di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

4. Menggali permasalahan mengenai tenaga pendidik dan kependidikan di SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang

Dalam mendapatkan permasalahan mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan wawancara indept interview kepada tenaga pendidik dan kependidikan terkait permasalahan yang ada. (memakai *Key Informant*).

5. Menciptakan model atau pola sebagai pemecahan masalah tenaga pendidik dan kependidikan di SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang

Melakukan analisi pemecahan permasalahan dengan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dan jalan keluar yang dilakukan dengan melihat tanggungjawab dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam memecahkan permasalahan yang ada.

6. Menciptakan sistem atau pola pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar nasional. Analisa sistem atau pola pendidik yang berkualitas dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait standar pendidik di jenjang pendidikan SD dan SMP.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Jadwal Pelaksanaan Kerja

Penyusunan jadwal pelaksanaan kerja dilakukan berdasarkan item-item pekerjaan yang telah dijelaskan pada bagian Pendekatan dan Metodologi sesuai dengan urutan-urutan pelaksanaannya dan dengan perhitungan teknis pelaksanaan yang telah dilakukan. Jadwal pelaksanaan kerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

Tabel 4.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | Bulan 1 | | | | Bulan 2 | | | | Bulan 3 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tahap I PERSIAPAN | | | | | | | | | | | | |
| Mobilisasi Tim | | | | | | | | | | | | |
| Perumusan Desain Studi | | | | | | | | | | | | |
| Pematangan Rencana Studi | | | | | | | | | | | | |
| Penyiapan Peta Dasar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tahap II PENGUMPULAN DATA DAN KAJIAN LITERATUR | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Persiapan Pengumpulan Data dan kajian Literatur | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Pengumpulan Data dan kajian Literatur | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tahap III ANALISIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Analisis Kebijakan | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Analisis Fisik Dasar | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Analisis Demografi | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Analisis Sosial Budaya | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Analisis Penggunaan Lahan | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 Analisis Ekonomi | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 Analisis Kebutuhan Prasarana | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 Analisis Kelembagaan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | Bulan 1 | | | | Bulan 2 | | | | Bulan 3 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tahap IV PERUMUSAN KONSEP PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | |
| Tahap V PERUMUSAN POLA DAN KONSEP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | |
| PELAPORAN | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Pendahuluan | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Antara (Fakta dan Analisis) | | | | | | | | | | | | |
| Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | |
| PEMBAHASAN | | | | | | | | | | | | |
| Diskusi Laporan Pendahuluan | | | | | | | | | | | | |
| Diskusi Laporan Antara (Fakta dan Analisis) | | | | | | | | | | | | |
| Diskusi Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | |

4.2 JADWAL TENAGA AHLI

Dalam Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDN dan SMPN Kabupaten Tangerang, seluruh tenaga ahli akan dilibatkan sesuai dengan jumlah orang-minggunya. Untuk lebih jelasnya, Jadwal Penugasan Tenaga Ahli dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut.

Tabel 4.2. Jadwal Pelaksanaan Kerja Untuk Tenaga Ahli

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | BULAN 1 | | | | BULAN 2 | | | | BULAN 3 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TENAGA AHLI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Team Leader | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ahli Ekonomi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ahli Pendidikan | | | | | | | | | | | | |

| TENAGA PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Operator Komputer | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Surveyor | | | | | | | | | | | | |